



KR-Antara/Yusuf Nugroho

Warga menggunakan perahu melintasi jalan yang tergenang banjir di Dukuh Tanggulangin, Jati Wetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (24/2/2023).

## PRESIDEN MINTA PARA MENTERI

# Jaga Ketersediaan Pangan Jelang Puasa

**JAKARTA (KR)** - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri agar dapat menjaga ketersediaan bahan pangan menjelang Puasa Ramadan yang akan dimulai pada pekan ketiga Maret 2023.

"Hari ini Bapak Presiden mengumpulkan kita dalam rapat terbatas, terdiri dari Pak Menko, menteri bahkan Kapolri dan unsur-unsur terkait termasuk Bulog. Bapak Presiden secara detil mencoba mengecek satu persatu dari 12 komoditas yang ada," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/2).

Rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi itu dihadiri antara lain Menko Perekonomian Air-lingga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

"Mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, gula, khususnya dalam rangka ketersediaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang," tambah Syahrul.

Syahrul mengatakan, Presiden me-

merintahkan semua menteri untuk bersama-sama mengecek *buffer stock* bahan pangan tersebut di lapangan. "Neraca kita sampai Maret alhamdulillah cukup tersedia dan ini berarti bahwa distribusi logistik harus kita benahi, perbaiki dan kerja sama dengan Pemda, para gubernur, para bupati," ungkap Syahrul.

Presiden secara khusus menyoroti ketersediaan beras pada periode Januari-Maret. "Karena ini berkaitan dengan Kementan, akan ada panen raya sekitar 1 juta hektare pada Februari dan Maret ini, sehingga 'peak' dari panen raya akan terjadi di sekitar bulan ini," tambah Syahrul.

Kerja sama dengan pihak swasta juga harus dilakukan untuk menjaga distribusi pangan. "Yang lain tentang minyak goreng. Saya tentu tidak dalam kompetensi tetapi minyak goreng ini dilaporkan juga sama, neraca kita cukup tersedia. Mudah-mudahan saat Ramadan dan Idul Fitri nanti semua bisa berjalan sesuai harapan," ungkap Syahrul.

Sedangkan terkait bahan pangan yang masih berasal dari impor seperti daging, Presiden memerintahkan agar menteri juga menjaga ketersediaannya. "Daging importasi, Bapak Presiden betul-betul meminta semua menteri memberikan perhatian yang serius hingga tidak ada hambatan dalam ketersediaan sampai di daerah," kata Syahrul.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, Presiden secara khusus meminta ketersediaan beras. "Beliau memang agak keras untuk memastikan stok ada. Pertama beras, dalam satu bulan ke depan kita panen raya maka Bulog diperintahkan langsung untuk siap-siap mulai menaikkan harga gabah kering panen/gabah kering giling supaya Bulog bisa menyerap," kata Arief.

Arief menegaskan, arahan Presiden, masuk puasa, Lebaran, barang sudah ada. "Jadi, beliau agak keras untuk memastikan stok itu ada," kata Arief Prasetyo.

Arief menjelaskan, dalam sebulan ke depan, daerah-daerah sentra produksi beras akan memasuki masa panen raya. Dengan begitu, Presiden memerintahkan Perum Bulog untuk bersiap menyerap beras dari para petani. (Ant/San)-f

## PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL

# 18.092 Penyuluh Agama Lulus Pelatihan

**JAKARTA (KR)** - Sebanyak 18.092 Penyuluh Agama Islam (PAI) dinyatakan lulus menjadi Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti serangkaian materi pelatihan dan ujian yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).

"Alhamdulillah proses pelatihan massal serentak yang dilakukan secara daring oleh BPJPH telah selesai pada 20 Februari 2023. Berdasarkan evaluasi, dari 26.000 penyuluh agama yang mendaftar, sebanyak 18.092 orang dinyatakan lulus," ujar Kepala BPJPH M Aqil Irfham di Jakarta, Jumat (22/2).

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Ditjen Bimas Islam, dan antusiasme seluruh peserta, Satgas Halal Provinsi, serta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) selama proses pelatihan

ini," imbuhnya,

Aqil juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengupayakan pelatihan pendamping dengan metode massal daring untuk pertama kalinya. "Ini upaya kita untuk dapat mempercepat capaian 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di 2023. Sesuai komitmen kita, bulan Februari ini kita jadikan bulan pelatihan. Seluruh pelatihan pendamping harus tuntas di bulan ini," tegas Aqil.

Selanjutnya, para penyuluh agama ini bergabung pada 153 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Para pendamping ini bisa langsung bekerja mendampingi pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) di 2023 ini. Mulai identifikasi pelaku usaha terdekat yang akan didampingi, kemudian membuat jadwal rutin, komunikasi, dan mentoring dengan LPPPH," jelas Aqil.

Aqil meminta para Pendamping PPH untuk membuat jadwal rutin koordinasi dan pelaporan dengan Satgas Layanan Halal JPH. "Ingat, komunikasi dengan Satgas, LPPPH, dan pelaku usaha harus dibangun dengan baik dan kondusif. Selamat bekerja, mari kita sukseskan Sehati 2023," kata Aqil.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Dzikro menuturkan, Pelatihan Pendamping PPH bagi Penyuluh Agama telah terselenggara dalam dua batch. "Di Batch 1 yang lulus 13.657 orang, sementara Batch 2 lulus 4.435 orang. Total penyuluh agama yang lulus sebagai Pendamping PPH sebanyak 18.092 orang," paparnya.

Dzikro menuturkan, untuk mendukung percepatan capaian 1 Juta Sehati, pihaknya akan terus melakukan pelatihan guna mencetak Pendamping PPH. (Ati)-f

# Polri Musnahkan 391,03 Kg Barang Bukti Narkoba

**JAKARTA (KR)** - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan 391,03 kilogram barang bukti narkoba hasil sitaan dari delapan berkas perkara tindak pidana narkoba selama kurun waktu 2022-2023.

Barang bukti narkoba dimusnahkan menggunakan incenerator milik Polri di kawasan parkir Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/2).

Wakil Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Jayadi menyebutkan, 390,41 kg barang bukti narkoba itu terdiri atas 373,23 kg sabu, 17,8 kg ganja. Kemudian turut dimusnahkan pula sebanyak 705 butir ekstasi. "Barang bukti narkoba ini disita dari delapan kasus dengan tersangka berjumlah 18 orang laki-laki dan satu perempuan," ucap Jayadi.

Jayadi merincikan delapan perkara tersebut, berasal dari pengungkapan perkara tanggal 7 Februari di Parepare, Sulawesi Selatan, sebanyak 20 kg sabu dan 750 ekstasi yang disita dari tiga tersangka. Kemudian pengungkapan sabu 200 kg pada 17 Februari di Aceh Utara, dengan tiga tersangka. Pengungkapan 5 Februari, 17 kg ganja disita dari satu tersangka di Kota Cilegon dan 1 kg sabu dari satu tersangka di Tangerang, Banten.

Perkara selanjutnya 25 Januari sebanyak 149 kg sabu disita dari lima tersangka di Pidie Jaya, Aceh. Pengungkapan 20 Januari sebanyak 3,191 gram dari satu tersangka di Jakarta Barat. Lalu, pengungkapan 19 Januari sebanyak 41,71 gram sabu disita dari dua tersangka di Jakarta

Utara. Termasuk satu perkara diungkap pada 17 Desember 2022 sebanyak 866 gram ganja disita dari dua tersangka di wilayah Jakarta Timur.

Yang menarik dari pemusnahan ini, untuk pertama kalinya dilaksanakan menggunakan incenerator milik Bareskrim Polri. Selama ini pemusnahan dilakukan di incenerator milik pihak lain seperti di RSCM Jakarta.

Jayadi menjelaskan, incenerator milik Polri tersebut memiliki suhu pembakaran mencapai 1.400 derajat Celsius, mampu membakar kurang lebih 200 kg. "Dalam satu jam pada suhu maksimal antara 1.000 sampai 1.400 derajat Celsius bisa membakar 200 kg narkoba," tutur Jayadi.

(Ant/San)-d

# Atasi Banjir Kudus dengan Mesin Pompa

**KUDUS (KR)** - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai mengoperasikan mesin pompa pengendali banjir untuk mengurangi genangan banjir di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, karena permukiman warga mulai tergenang banjir.

"Dua unit mesin pompa pengendali banjir dihidupkan semua untuk mengurangi genangan banjir di Desa Jati Wetan. Ketika debit air Sungai Wulan di bawah 150 meter kubik, maka cukup membuka pintu pembuang air ke Sungai Wulan," kata Kepala Dinas PUPR Kudus Arif Budi Siswanto di Kudus, Jumat (24/2). Dengan demikian, kata Arif, pengoperasian mesin pompa di Desa Jati Wetan juga disesuaikan dengan debit air di Sungai Wulan.

Kepala Desa Jati Wetan Agus Susanto mengungkapkan, banjir yang terjadi di desanya karena intensitas hujan yang cukup tinggi, sedangkan pintu air pembuang ke arah Sungai Wulan tidak bisa dibuka lantaran debit airnya juga meningkat.

Ketika turun hujan cukup lama, kata Agus, desanya memang rawan banjir, sehingga satu-satunya jalan dengan membuang genangan air melalui pintu pembuang menuju Sungai Wulan.

Sejak empat hari lalu, imbuhnya, genangan air di Dukuh Gendok dan Tang-

gulangin memang tinggi, sehingga perlu dibuang ke Sungai Wulan. "Sebelumnya memang sempat dibuang, namun karena debit air Sungai Wulan juga meningkat akhirnya ditutup kembali dan hanya mengandalkan mesin pompa. Namun, karena intensitas hujannya juga tinggi akhirnya terjadi banjir," ujarnya.

Untuk Jumat kemarin, katanya, debit air Sungai Wulan kembali turun, sehingga pintu pembuang bisa dibuka kembali. Ia berharap debit air Sungai Wulan tidak meningkat, sehingga genangan banjir di Desa Jati Wetan cepat surut. "Meskipun tidak ada warga yang mengungsi, kami tetap menyiapkan tempat pengungsian karena rumah warga yang tergenang banjir mencapai ratusan rumah," ujarnya.

Sulis, warga Desa Jati Wetan mengakui genangan banjir terjadi sejak Selasa (21/2) karena ketika curah hujan tinggi akan muncul genangan. Sedangkan agar cepat surut, harus dibuang ke Sungai Wulan melalui pintu pembuang ketika debit Sungai Wulan tidak naik. Rumahnya, kata dia, juga tergenang banjir di atas mata kaki.

Pada awal Januari 2023, ratusan warga Desa Jati Wetan terpaksa mengungsi karena tempat tinggalnya tergenang banjir. Mereka baru bisa pulang ke rumahnya selang dua pekan setelah banjir surut.

(Ant/Trq/San)-f

## PERINTANGAN PENYIDIKAN BRIGADIR J

# Hakim Sayangkan Keterlibatan Irfan

**JAKARTA (KR)** - Terdakwa kasus perintangan keadilan (*obstruction of justice*) dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Irfan Widyanto, divonis hukuman penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan Widyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (24/2).

Hakim menyatakan Irfan terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, yakni melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam menyusun putusan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan dalam putusan itu, salah satunya adalah Irfan seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang berkaitan dengan tindak pidana.

"Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya. Namun, terdakwa malah turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundang," kata Afrizal.

Sementara itu, hal meringankan dalam putusan itu adalah Irfan

pernah mengabdikan kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan Adhi Makayasa atau lulusan Akademisi Polisi (Akpoli) terbaik tahun 2010. Selain itu, dalam masa tugasnya, Irfan memiliki kinerja yang baik, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan kariernya. "Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga," tambahnya.

Vonis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan pada Jumat, 27 Januari 2023. Sebelumnya, JPU menuntut Irfan Widyanto menjalani pidana penjara selama satu tahun.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widyanto selama satu tahun," kata JPU saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (27/1).

(Ant)-f



Teatrikal Pertempuran Plataran di Monumen Plataran Kalasan Sleman

KR-Istimewa

# Plataran, Bagian Sejarah Akmil Magelang

**SLEMAN (KR)** - Tepat 74 tahun lalu, 24 Februari 1949, Dusun Plataran Selomartani Kalasan Sleman bergolak. Retentat senjata dan dentuman artileri memecah kesunyian. Tentara Belanda menyerbu pasukan Indonesia yang sebagian besar merupakan kadet Militer Akademi (MA) yang sedang bergerilya di daerah tersebut.

Serangan keras dan mendadak datang dari dua penjuru. Hal itu tersebut membuat TNI yang dibantu rakyat terkejut. Tidak pelak banyak pejuang menjadi korban. Termasuk beberapa kadet atau taruna MA yang namanya diabadikan hingga saat ini. Termasuk tempat pertempuran tersebut dibangun monumen dengan identitas Monumen Perjuangan Taruna Plataran untuk mengenang jasa mereka.

Gambaran perjuangan dan pertempuran tersebut disajikan dalam Sosio Drama Teatrikal Pertempuran

Plataran rangkaian Peringatan 74 Tahun Pertempuran Plataran di Monumen Plataran, Jumat (24/2). Kehadiran tersebut didukung penuh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY melalui alokasi Dana Keistimewaan. Tergambar jelas, tekanan berat yang dihadapi pasukan TNI bersama rakyat saat menerima serangan dari Tentara Belanda.

"74 tahun lalu terjadi pertempuran Plataran di tempat ini. Bahwa masyarakat Plataran ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah Militer Akademi (MA) Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Akademi Militer (Akmil) Magelang," kata Gubernur Akmil Mayjen Legowo WR Jatmiko dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan 74 Tahun Pertempuran Plataran.

Ketika itu dikisahkan, MA dipimpin Kolonel GPH Djuatikusumo yang secara tegas berusaha menyelamatkan kadet

dengan menempatkan di tengah masyarakat. Tanpa diduga mereka mendapat serangan mendadak dari Belanda karena ada kebocoran intelijen.

Meski hanya berlangsung 3 jam, pertempuran tersebut mengakibatkan delapan pejuang Indonesia gugur. Lima di antara mereka merupakan kadet, dua perwira instruktur termasuk Letda Utoyo dan anggota Tentara

Pelajar. Peristiwa tersebut juga merupakan duka bagi sejarah MA Yogyakarta yang menjadi Akademi Militer Nasional pertama di masa revolusi. "Harapannya generasi muda kembali melanjutkan semangat perjuangan dengan

kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan," tegas Kepala Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusyawaratan Dinas Kebudayaan DIY Budi Husada di sela acara. (Feb)